

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Desa

2.1.1. Definisi Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, membina, dan meningkatkan perekonomian desa sehingga dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Dalam sektor ekonomi, kepala desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengelola keuangan serta aset desa. Desa sebagai suatu bagian dari pemerintahan, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018).

Menurut Danuta (2017), kualitas laporan keuangan desa juga menjadi indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa, terutama oleh Kementerian Desa secara umum. Pengukuran kualitas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan pendapat yang diberikan oleh BPK atas hasil audit yang telah dilakukan.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.2.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan, laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari transaksi dan status keuangan yang dilaksanakan oleh sebuah entitas saat periode pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah, mengevaluasi kondisi ekonomi, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula, laporan tentang pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk akuntabilitas kinerja yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setiap laporan keuangan desa harus memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi yang disajikan harus mengikuti standar laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan serta diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan desa tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

2.2.2. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat empat karakteristik kualitatif yang menjadi ukuran normatif untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan. Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah:

1. Relevan

Untuk dianggap relevan, sebuah laporan keuangan harus mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan melakukan koreksi atau perbaikan terhadap hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan harus mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Laporan keuangan berisi informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi sejauh mana ekspektasi mereka terpenuhi di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*)

Dalam laporan keuangan, informasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk membuat prediksi tentang masa depan berdasarkan kinerja masa lalu dan peristiwa terkini.

- c. Tepat waktu (*timeliness*)

Ketepatan waktu saat menyajikan informasi dalam laporan keuangan sangat penting agar informasi tersebut efektif dan bermanfaat guna pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang relevan dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas secara akurat dan transparan.

2. Andal

Laporan akuntansi tahunan harus mengandung informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta mencerminkan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Hal ini sangat penting agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas secara akurat dan dapat memutuskan tindakan bisnis yang tepat. Jika informasi dalam laporan keuangan tidak akurat atau disajikan dengan cara yang menyesatkan, maka penggunaannya dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah dan merugikan informasi keuangan. Oleh karena itu, informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Dalam laporan keuangan informasi yang disajikan harus dapat menggambarkan transaksi dan peristiwa akuntansi dengan jujur dan

wajar. Artinya, informasi tersebut harus menggambarkan realitas yang sebenarnya secara objektif dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan seharusnya dapat diuji untuk memastikan kebenarannya. Hasil dari pengujian harus menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

c. Netralitas

Informasi dalam laporan keuangan seharusnya diarahkan pada kebutuhan umum, bukan hanya pada kebutuhan pihak tertentu atau kelompok kepentingan tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas pelaporan lainnya secara umum. Hal ini karena perbandingan tersebut bisa membantu pengguna untuk memahami tren dan perubahan dalam keuangan entitas pelaporan serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang memungkinkan perbandingan antara periode atau antar

entitas pelaporan yang serupa sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna dan menggunakan istilah dan format yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna. Hal ini sangat penting karena laporan keuangan dapat diakses oleh berbagai pengguna yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan aspek kejelasan, keakuratan, dan kemudahan pemahaman agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna.

Berdasarkan dari keempat indikator yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan mengadopsi kuesioner yang telah disesuaikan dari penelitian Atikah (2019).

2.3. Akuntabilitas

2.3.1. Definisi Akuntabilitas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Akuntabilitas merupakan faktor internal dari perangkat desa untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam menunjukkan kinerja optimalnya dan kewajibannya serta menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Berdasarkan Widodo (2011), akuntabilitas merupakan syarat yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dianggap sebagai faktor pendukung kualitas laporan keuangan desa. Apabila perangkat desa tidak memiliki akuntabilitas, mereka tidak akan dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, laporan keuangan desa dapat dinilai kurang baik atau buruk.

2.3.2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Peraturan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2022, indikator akuntabilitas meliputi:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Berdasarkan indikator Akuntabilitas diatas, penelitian ini akan mengadopsi kuesioner yang telah disesuaikan dari penelitian Atikah (2019).

2.4. Transparansi

2.4.1. Definisi Transparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah saat membentuk kebijakan fiskal daerah agar diketahui dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. Menurut Amalia (2017), transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dapat menciptakan keadilan dan mendorong pengungkapan kondisi yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan setiap pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan organisasi dapat mengukur dan mengantisipasi berbagai hal yang terkait dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, transparansi memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu organisasi. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi, dimana informasi yang terkait dengan kepentingan publik dapat diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkannya secara langsung. Dengan demikian, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses pada informasi penting yang berkaitan dengan organisasi atau pemerintahan, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diambil. Hal ini memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Transparansi laporan keuangan pemerintah desa adalah prinsip yang menjamin ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh setiap orang mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat

dan pihak terkait dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai laporan keuangan pemerintah desa, sehingga dapat memantau pengelolaan keuangan desa secara lebih baik dan memberikan masukan serta saran yang konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, jika transparansi rendah, maka akan sulit bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan memantau pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

2.4.2. Manfaat Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan, termasuk peraturan, kebijakan pemerintah, dan informasi lainnya yang tersedia untuk umum. Ini berarti bahwa tujuan dari transparansi adalah untuk menyediakan akses bebas yang cukup terhadap informasi agar dapat dipahami dan diawasi. Manfaat transparansi menurut Andrianto (2007), terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas

Dengan transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Meningkatkan partisipasi publik

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai hal, seperti pilihan politik, penilaian kinerja pemerintah, dan lainnya.

3. Meningkatkan kredibilitas

Dengan memberikan akses informasi yang terbuka, transparansi membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas terhadap pihak yang terkait, seperti pemerintah atau organisasi.

4. Mencegah korupsi

Dengan transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kebijakan dilakukan dengan transparan dan tidak ada praktik korupsi.

5. Meningkatkan efisiensi

Dengan adanya transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam sistem yang ada, sehingga memudahkan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi.

2.4.3. Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu

Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk mencegah tertundanya pengambilan keputusan tersebut, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu.

2. Memadai

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia melibatkan pengungkapan yang memadai atas hal-hal material yang informatif.

3. Jelas

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, informasi harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

4. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

5. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan seharusnya dapat dibandingkan dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya dan dapat dibandingkan dengan institusi sejenis. Oleh karena itu, daya banding yang dimaksudkan adalah bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi sejenis lainnya.

6. Mudah diakses

Semua pihak harus dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

7. Kondisi Keuangan

Sebuah gambaran lengkap atau status keuangan suatu organisasi selama periode atau durasi tertentu.

8. Susunan pengurus

Unit-unit kerja yang terdiri dari organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas dan koordinasi dari berbagai fungsi atau aktivitas yang berbeda.

9. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Sebuah rangkaian langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini akan menggunakan indikator tersebut sebagai alat untuk mengukur variabel transparansi yang akan dimodifikasi dari penelitian Riyanti (2017).

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006), sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Sedangkan menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan,

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi akan mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal ketika pengendalian internal dijalankan dengan baik. Hal ini juga memastikan kebenaran penyajian informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.5.2. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Lima komponen sistem pengendalian internal yang saling berhubungan diidentifikasi oleh COSO dalam Boynton, dkk. (2002) untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal suatu entitas. Kelima komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian memengaruhi kesadaran orang-orang dalam organisasi terhadap pengendalian dan menentukan suasana di dalamnya. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua elemen pengendalian internal yang lain.

2. Penilaian risiko

Pengendalian internal harus melakukan evaluasi terhadap risiko yang dihadapi oleh unit organisasi baik dari dalam maupun luar organisasi. Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan risiko tersebut harus dinilai relatif terhadap toleransi risiko yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, penilaian risiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu menjamin bahwa instruksi dari pimpinan instansi pemerintah dijalankan. Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi, dan dilaksanakan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap entitas dalam menjalankan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan, berkualitas baik, berasal dari sumber internal maupun eksternal, serta disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu dan tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Kegiatan pemantauan melibatkan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Lima komponen di atas akan digunakan menjadi indikator dalam mengukur sistem pengendalian internal menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Atikah (2019).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory adalah suatu keadaan dimana manajemen tidak dimotivasi oleh keinginan pribadi tetapi dipusatkan pada kepentingan organisasi sebagai tujuan utama (Donaldson & Davis, 1991). Seiring dengan meningkatnya persyaratan akuntabilitas organisasi sektor publik, semakin sulit bagi otoritas untuk memenuhi fungsi manajemen keuangan mereka sendiri, sehingga peran akuntansi dalam memisahkan fungsi-fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen diperlukan untuk memikul tanggung jawab sosial serta tanggung jawab atas pengelolaan milik negara.

Stewardship theory menegaskan bahwa kepentingan masyarakat bisa dioptimalkan dengan membagi hak, tanggung jawab, dan wewenang antara pengawas dan manajemen, sehingga *stewardship theory* menyatakan para eksekutif lebih semakin memiliki motivasi untuk bertindak dalam kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi (Hunger & Wheelen, 2004). Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi. Kesuksesan dapat tercapai dengan mengoptimalkan utilitas prinsipal dan manajemen.

Teori ini menggambarkan hubungan antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Pada awalnya, akuntansi hanya memfokuskan pada pencatatan, pengamanan aset, dan pelaporan keuangan. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, disiplin akuntansi mengalami perluasan dan menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi. *Stewardship theory* kemudian muncul sebagai hasil dari pengembangan teori ini.

Melalui *stewardship theory* penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa berperan sebagai *steward*, yang bertugas memberikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau pemerintah terhadap pengelolaan anggaran negara agar dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk menjadi lembaga yang andal, pemerintahan desa diharuskan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan kepadanya dengan harapan tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat tercapai secara optimal.

2.6.2. Hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 adalah:

“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Menurut Widodo (2011), akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran .

Akuntabilitas merupakan keharusan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Entitas kebijakan publik dalam hal ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas sikap, perilaku, dan tindakannya kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban, fungsi, dan wewenangnya yang menjadi andal dan berperan sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Misalnya, pemerintah yang wajib memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi. Laporan keuangan yang dimiliki oleh perangkat desa berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan desa dan juga kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

2.6.3. Hubungan Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Transparansi kebijakan dan keputusan organisasi manapun dapat menciptakan keadilan dan mendorong pengungkapan yang benar, memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengukur dan memprediksi segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi (Amalia, 2017).

berkaitan dengan kepentingan umum diterima langsung oleh mereka yang

membutuhkannya (Mardiasmo, 2009). Dengan transparansi laporan keuangan setiap desa, keadilan tercapai, dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya dimajukan sehingga kualitas keuangan desa baik dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

2.6.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“rencana sebuah organisasi dan seluruh tindakan serta teknik terkoordinasi yang telah diterapkan di sebuah perusahaan untuk melindungi aset, menjaga keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, menaikkan efisiensi dan menaikkan pelaksanaan kebijakan manajemen.”

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain suatu perusahaan, yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan keefektifannya. dan efisiensi untuk memastikan efisiensi operasional.”

Dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik, maka diperlukan lima komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan (COSO dalam Boynton, dkk., 2002). Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Maria Susanti Liu (2020) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Afrijal (2018) yang berjudul Pengaruh Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus). Hasil dari penelitian ini adalah Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ferdian (2021) mengangkat judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Dusun di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan, aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Astuti (2023) mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas, partisipasi , anggaran, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rofikoh & Ayem (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen). Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi akuntansi, pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Selanjutnya penelitian keenam yang dilakukan oleh Atikah (2019) dengan judul Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo). Menyatakan bahwa sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Pratiwi (2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Riyanti (2017) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini memberikan hasil akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi dan penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Hasliani & Yusuf (2021) yang berjudul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Murniati (2021) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. Penelitian ini memberikan hasil system pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Liu (2020)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Partisipasi Masyarakat X ₃ : Transparansi X ₄ :Pengendalian Internal	Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunungkidul	1. Akuntabilitas berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan desa. 2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 4. Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2	Rifandi (2019)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa Variabel Independen (X): X ₁ : Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Daerah X ₂ :Akuntabilitas X ₃ : Transparansi	Pemerintah Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo	1. Implementasi aplikasi sistem keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3.	Afrijal (2018)	Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas pengelolaan dana desa Variabel Independen (X): X ₁ : Transparansi X ₂ : Sistem Pengendalian Internal	Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus	1. Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

4.	Ferdian (2021)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa Variabel Independen (X): X ₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₂ : Aplikasi Sistem Keuangan Desa X ₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₄ : Sistem Pengendalian Internal	Pemerintah Dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir	1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
5.	Astuti (2023)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Daerah Variabel Independen (X): X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi X ₃ : Partisipasi Anggaran X ₄ : Pengendalian Internal	Perangkat Daerah Kabupaten Klaten	1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
6.	Ayem & Rofikoh (2020)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa	Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen	1. Kompetensi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

		Variabel Independen (X): X_1 : Kompetensi Akuntansi X_2 : Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 X_3 : Sistem Informasi X_4 : Pengendalian Internal		2. Pemahaman Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 4. Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
7.	Atikah (2019)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa Variabel Independen (X): X_1 : Sistem Keuangan Desa X_2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X_3 : Sistem Pengendalian Internal	Perangkat desa di wilayah Kabupaten Situbondo	1. Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
8.	Pratiwi(2022)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa Variabel Independen (X): X_1 : Transparansi X_2 : Akuntabilitas X_3 : Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk	1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
9.	Riyanti(2017)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Daerah Variabel Independen (X): X_1 : Akuntabilitas X_2 : Transparansi X_3 : Penerapan Standar Akuntansi	Pemerintah desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang	1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap

		Pemerintah X ₄ : Penerapan Sistem Pengendalian Internal		kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10.	Hasliani & Yusuf (2021)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Variabel Independen (X): X ₁ : Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa X ₂ : Transparansi	Perangkat desadi Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
11.	Murniati (2021)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Variabel Independen (X): X ₁ : Sistem Pengendalian Internal X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Transparansi		1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah. 3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Widodo (2011), akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014, akuntabilitas adalah:

“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas diperlukan adanya akuntabilitas yang memadai dalam pembuatannya.

Hasil penelitian dari Liu (2020) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian mengenai akuntabilitas pernah dilakukan oleh (Astuti, 2023) dan menunjukkan hasil akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian hasil penelitian dari Pratiwi (2022) akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan Riyanti (2017) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lain dari (Murniati, 2021) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika Septyaningtyas (2017), yang mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} = Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

2.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi maka keadilan dapat ditimbulkan serta akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi (Amalia, 2017). Penyajian laporan keuangan yang transparan dan terbuka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi transparansi maka kualitas laporan keuangan desa akan semakin meningkat.

Hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh Liu (2020) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasliani & Yusuf (2021) yang menunjukkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2021) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

desa. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Riyanti (2017) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh Liu (2020) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasliani & Yusuf (2021) yang menunjukkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2021) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Riyanti (2017) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public*

Accountants (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.”

Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

Keterkaitan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan desa telah dibuktikan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Rofikoh (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Afrijal

(2018) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2019) yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian lain dilakukan oleh Liu (2020) dengan hasil pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) memberikan hasil yang berbeda, yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3} = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.